

PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI ERA OTONOMI DAERAH: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya

DEVELOPMENT OF RESETTLEMENT IMPLEMENTATION UNDER DECENTRALIZATION: a special Study Transmigration Interaction With The Surrounding

Oleh: Junaidi, Ernan Rustiadi, Slamet Sutomo, Bambang Juanda

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB
(Diterima: Tanggal 23 Desember 2011, disetujui tanggal 27 Februari 2012)

ABSTRACT

This study was aimed to develop transmigration pattern corresponding to regional autonomy era with strong emphasis on linkage between transmigration settlements location with the surrounding area. The study was conducted at the ex-transmigration villages in Jambi Province. The interaction between transmigration villages with the surrounding residential area approached through various socio-economic activities. Logit regression model use to analyze the determinants of the interaction. The study found low interaction between ex-transmigration villages with the surrounding areas. This is due to underdeveloped various facilities and unbalanced production activities growth between transmigration and non-transmigration villages, relatively far distance among transmigration village, and limited social capital development at the community level. According to the results, this study suggests that the pattern of transmigration area development integrated social-functional-spatial.

Keywords : ex-transmigration villages, interaction between region, determinants of the interaction, social capital development

PENDAHULUAN

Transmigrasi sebagai salah satu program kependudukan di Indonesia, dalam pelaksanaannya telah menunjukkan berbagai keberhasilan, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan transmigran, penciptaan kesempatan kerja, maupun dari sisi pembangunan desa-desa baru ataupun pusat pertumbuhan. Di daerah asal, kontribusi pembangunan transmigrasi terutama dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja dan berusaha maupun mendukung pembangunan beberapa infrastruktur strategis.

Realitas tersebut menunjukkan, transmigrasi telah menjadi salah satu program “unggulan” dalam membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan potensi sumber-

daya wilayah. Transmigrasi juga dapat menjadi contoh khas dan strategi pengembangan wilayah “original” Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran berharga dalam pengembangan potensi wilayah. Namun, di era otonomi terjadi penurunan penempatan transmigran. Pada Pelita VI (Orde Baru) rata-rata penempatan transmigran 350.064 KK pertahun, pada era otonomi Tahun 2000– 2004 turun menjadi 87.571 KK pertahun. Penurunan berlanjut pada Tahun 2005–2009 menjadi 41.853 KK pertahun dan menjadi 7.310 KK pertahun pada Tahun 2010-2011.

Selain akibat mulai terbatasnya ketersediaan lahan, lemahnya kelembagaan penyelenggaraan transmigrasi era otonomi di daerah

serta rendahnya inisiatif daerah dalam membangun transmigrasi dengan alasan biaya (Anharudin *et al.* 2008), penyebab penurunan ini adalah adanya pembangunan transmigrasi yang bersifat eksklusif sehingga kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya (Siswono, 2003). Ini menyebabkan desa-desa transmigrasi yang berhasil, cenderung tumbuh menjadi kawasan “enclave” yang hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan transmigran, dengan kontribusi yang rendah pada pengembangan wilayah sekitarnya. Pada tahap selanjutnya, berdampak pada penolakan berbagai daerah untuk menjadi daerah penempatan transmigran.

Dalam konteks transmigrasi sebagai program untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pemukiman transmigrasi selain diharapkan mampu berkembang baik, juga mampu berdampak positif pada pengembangan wilayah sekitarnya. Jika perkembangan permukiman transmigrasi tidak terkait dengan wilayah sekitarnya, akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dapat memicu ketidakpuasan antar wilayah serta membuka peluang munculnya ketidakstabilan politik daerah. Ketidakstabilan politik akan sangat merugikan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkan penyelenggaraan transmigrasi yang memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitarnya sehingga mampu mendorong perkembangan wilayah (desa-desa) sekitarnya serta perkem-

bangun ekonomi daerah.

Dalam rangka tersebut diperlukan pengetahuan mengenai pemukiman transmigrasi setelah masa pembinaan dan menjadi desa definitif. Selama ini, kajian-kajian pemukiman transmigrasi telah banyak dilakukan, namun demikian hanya terbatas pada pemukiman masa pembinaan (antara 5 – 6 tahun) dan hasil kajian tersebut hanya terbatas menggambarkan kinerja pembangunan transmigrasi pada masa pembinaan dan tidak terdapat pembelajaran apa yang terjadi setelah proses pembinaan. Ini berimplikasi pada kesulitan dalam menilai keberlanjutan keberhasilan pembangunan transmigrasi khususnya dalam konteks keterkaitan dengan pengembangan wilayah sekitarnya.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan transmigrasi yang sesuai dengan era otonomi daerah. Penyelenggaraan yang sesuai dengan era otonomi daerah dimaksudkan sebagai penyelenggaraan transmigrasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan wilayah sekitarnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis keterkaitan desa-desa eks transmigrasi dengan wilayah sekitarnya; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterkaitan desa-desa eks transmigrasi dengan wilayah sekitarnya

Setiap bagian wilayah mempunyai faktor endowment yang khas dalam bentuk sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk dalam wilayah tersebut sering harus memenuhinya dari wilayah lain. Oleh karenanya pen-

duduk harus melakukan perjalanan ke wilayah lain sehingga membentuk struktur hubungan antar wilayah. Hubungan ini secara ekonomi dapat digambarkan sebagai proses permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Hubungan antar wilayah dapat disebut sebagai keterkaitan (*linkages*) antar wilayah. Hubungan antar wilayah dapat juga diartikan sebagai interaksi. Interaksi dapat diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi. Rondinelli (1985) mengemukakan proses-proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan di antara permukiman.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan adanya disparitas antar wilayah, maka akan terjadi hubungan timbal balik antar wilayah. Fu (1981) menggambarkan keterkaitan antar wilayah sebagai akibat ketimpangan dan kemiskinan. Menurut Fu, terdapat tiga hubungan dualistik dalam keterkaitan antar wilayah, yaitu: (1). Utara–Selatan, menggambarkan keterkaitan antar wilayah dalam suatu negara yang menggambarkan dua kutub; (2). Perkotaan–Pedesaan, menggambarkan keterkaitan intra wilayah; (3). Formal–Informal, menggambarkan keterkaitan antar wilayah pada kegiatannya.

Ketiga hubungan dualistik, berbeda antara satu negara dengan negara lain yang tergantung pada faktor dominan dan sejarah masing-masing negara. Faktor dominan tersebut adalah: (1). *Resource endowment*: pertanian, mineral dan sumberdaya alam lainnya; (2). *Karakteristik demografi*: kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan dan urbanisasi; (3). *Teknologi*: tipe-tipe teknologi yang diadopsi dan

pembangunan modal; (4). *Development ideologi*: ideologi dalam pembangunan negaranya.

Keterkaitan antar wilayah tidak dapat terjalin jika tidak didukung prasarana dan sarana penghubung antar kedua wilayah. Dukungan tersebut dapat merupakan prasarana dan sarana transportasi maupun dalam bentuk lainnya. Keterkaitan antar wilayah dapat menguntungkan, merugikan maupun saling mendukung salah satu maupun kedua wilayah yang berinteraksi tersebut. Douglas (1988) serta Harris dan Harris (1984) dalam Pradhan, (2003) mengemukakan bahwa apabila keterkaitan antar wilayah saling mendukung atau saling memperkuat (*mutually reinforcing*) atau generatif atau disebut partisipatif, maka kedua wilayah tersebut akan mendapat keuntungan atau manfaat dengan adanya hubungan tersebut. Tetapi bila keterkaitan antar wilayah lebih berbentuk eksploitatif atau parasitik, maka akan terjadi suatu wilayah yang semakin kaya dan semakin miskin.

Selanjutnya secara lebih khusus, Rondinelli (1985) mengelompokkan jenis-jenis keterkaitan utama dalam pembangunan spasial atas tujuh jenis keterkaitan yaitu (1) keterkaitan fisik yang mencakup jaringan jalan, jaringan transportasi sungai dan air, jaringan kereta api; ketergantungan ekologis; (2) ekonomi yang mencakup pola-pola pasar, arus bahan baku dan barang antara, keterkaitan produksi – backward, forward dan lateral, pola konsumsi dan belanja, arus pendapatan, arus komoditi sektoral dan interregional; (3) pergerakan penduduk yang

mencakup migrasi temporer dan permanen, perjalanan kerja; (4) teknologi yang mencakup kebergantungan teknologi, sistem irigasi, sistem telekomunikasi; (5) interaksi sosial yang mencakup pola visiting, pola kinship, kegiatan rites, ritual dan keagamaan, interaksi kelompok social; (6) delivery pelayanan yang mencakup arus dan jaringan energy, jaringan kredit dan financial, keterkaitan pendidikan, training, pengembangan, sistem delivery pelayanan kesehatan, pola pelayanan profesional, komersial, teknik, sistem pelayanan transportasi; (7) politik, administrasi dan organisasi yang mencakup hubungan structural, arus budget pemerintah, kebergantungan organisasi, pola otoritas-approval-supervisi, pola transaksi inter-yuridiksi, rantai keputusan politik formal

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi. Pemilihan Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan penempatan transmigran di daerah ini telah memiliki kurun waktu yang panjang (sejak tahun 1940) sehingga diharapkan dapat menggambarkan perjalanan panjang transmigrasi di Indonesia. Unit

analisis adalah desa eks transmigrasi yang telah menjadi desa definitif. Dari sebanyak 176 desa eks transmigrasi yang ada di Provinsi Jambi, dipilih enam desa sebagai sampel penelitian. Masing-masing dua desa (satu desa stadia perkembangan tertinggi dan satu desa stadia perkembangan terendah) berbasis tanaman pangan, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Penetapan stadia perkembangan desa didasarkan pada tiga indikator yaitu persentase rumah permanen (sebagai indikator tingkat kesejahteraan), persentase lahan pertanian (sebagai indikator aktivitas pertanian) dan rasio industri pertanian terhadap 1000 penduduk (sebagai indikator aktivitas non-pertanian). Masing-masing nilai indikator dibobot untuk mendapatkan indikator komposit. Selanjutnya pengelompokan desa berdasarkan stadianya menggunakan metode *K-Mean Cluster*.

Pada masing-masing desa sampel ditetapkan sampel keluarga sebesar 5 persen dari total populasi keluarga, yang dilakukan secara acak sederhana. Desa sampel dan jumlah sampel keluarga pada desa sampel diberikan sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi sampel keluarga pada desa penelitian, Tahun 2011

No	Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Komoditi	Stadia	Keluarga	Sampel
1	Mekar sari	Kumpeh Ilir	Ma. Jambi	Padi	Terendah	749	38
2	Bandar Jaya	Rantau Rasau	Tanjabtjm	Padi	Tertinggi	1048	52
3	Bukit Mas	Sungai Bahar	Ma. Jambi	Sawit	Terendah	384	19
4	Rasau	R.Pamenang	Merangin	Sawit	Tertinggi	765	38
5	Sungkai	Bajubang	Batanghari	Karet	Terendah	272	14
6	Rb. Mulyo	Rb. Bujang	Tebo	Karet	Tertinggi	1660	83
Jumlah						4878	244

Douglas (1998) mengemukakan salah satu bentuk keterkaitan antar wilayah adalah perjalanan penduduk baik untuk bekerja, bersekolah, belanja, berkunjung ataupun menjual barang dan jasa. Karenanya, penelitian ini menekankan pergerakan penduduk dari desa eks transmigrasi untuk berbagai aktivitas sosial ekonomi yang mencakup aktivitas bekerja, belanja, penjualan produk, keuangan, pendidikan, kesehatan rekreasi dan agama. Pergerakan penduduk dianalisis secara deskriptif.

Khusus pergerakan penduduk untuk ak-

tivitas bekerja dan belanja dilakukan pemodelan dengan model *binary logit*.

Model Pergerakan Penduduk untuk Bekerja:

Model perjalanan untuk kegiatan bekerja ini menggunakan data pada tingkat individu baik kepala keluarga maupun anggota keluarga (istri dan anak) yang bekerja, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Peubah tak bebas yang digunakan adalah lokasi bekerja antara desa dan luar desa sedangkan peubah bebasnya adalah karakteristik individu, keluarga dan stadia desa. Model diberikan sebagai berikut:

$$g(x_{ki}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_{2,D1} X_{2,D1} + \beta_{2,D2} X_{2,D2} + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_{5,D1} X_{5,D1} + \beta_{5,D2} X_{5,D2} + \beta_{5,D3} X_{5,D3} + \beta_{5,D4} X_{5,D4} + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

di mana:

$g(x_{ki})$ = peluang lokasi bekerja (0 = di desa; 1 = di luar desa)

X_1 = Umur (dalam tahun)

X_2 = Jenjang pendidikan formal

$X_{2,D1}$ 0 = SD ke bawah, 1 = SLTP;

$X_{2,D2}$ 0= SD ke bawah; 1 = SLTA ke atas

X_3 = Status Pekerjaan (0 = pekerjaan utama; 1 = pekerjaan sampingan)

X_4 = Status dalam keluarga (0 = kepala keluarga; 1 = anggota keluarga)

X_5 = Daerah asal

$X_{5,D1}$ 0 = Jambi, 1 = Jawa Tengah;

$X_{5,D2}$ 0 = Jambi; 1 = Jawa Barat

$X_{5,D3}$ 0 = Jambi; 1 = Jawa Timur;

$X_{5,D4}$ 0 = Jambi; 1 = Lainnya

X_6 = Luas lahan perkapita dalam keluarga (ha/ jiwa)

X_7 = Stadia Desa (0 = Rendah 1 = Tinggi)

$\beta_1, \beta_4, \beta_6, \beta_7 < 0$; $\beta_{5,D1}, \beta_{5,D2}, \beta_{5,D3} \neq 0$;

$\beta_{2,D1}, \beta_{2,D2}, \beta_3, \beta_4 > 0$

Model Pergerakan Penduduk untuk Belanja

Pemodelan perjalanan untuk kegiatan belanja menggunakan data pada tingkat keluarga mengingat kegiatan belanja umumnya dilakukan bersama-sama antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Peubah tak bebas adalah proporsi jenis belanja di luar desa terhadap total jenis belanja keluarga yang dikategorikan atas proporsi rendah dan proporsi tinggi. Kategori rendah atau tinggi dikelompokkan dengan menggunakan *K-Mean Cluster*. Peubah bebas yang digunakan adalah karakteristik individu, keluarga dan stadia desa. Model tersebut diberikan sebagai berikut:

$$g(x_{mi}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_{2.D1} X_{2.D1} + \beta_{2.D2} X_{2.D2} + \beta_3 X_3 + \beta_{4.D1} X_{4.D1} + \beta_{4.D2} X_{4.D2} + \beta_5 X_5 \\ + \beta_{6.D1} X_{6.D1} + \beta_{6.D2} X_{6.D2} + \beta_7 X_7 + \beta_{8.D1} X_{8.D1} + \beta_{8.D2} X_{8.D2} + \beta_{8.D3} X_{8.D3} \\ + \beta_{8.D4} X_{8.D4} + \beta_9 X_9 + e$$

dimana:

$g(x_{mi})$ = peluang proporsi belanja di luar desa (0 = rendah; 1 = tinggi)

X_1 = Umur Kepala Keluarga (tahun)

X_2 = Jenjang pendidikan formal Kepala Keluarga

$X_{2.D1}$ 0 = SD ke bawah, 1 = SLTP;

$X_{2.D2}$ 0 = SD ke bawah; 1 = SLTA ke atas

X_3 = Umur Istri (tahun)

X_4 = Jenjang pendidikan formal Istri

$X_{4.D1}$ 0 = SD ke bawah, 1 = SLTP;

$X_{4.D2}$ 0 = SD ke bawah; 1 = SLTA ke atas

X_5 = Umur Anak Tertua (tahun)

X_6 = Jenjang pendidikan formal Anak Tertua

$X_{6.D1}$ 0 = SD ke bawah, 1 = SLTP;

$X_{6.D2}$ 0 = SD ke bawah; 1 = SLTA ke atas

X_7 = Pendapatan perkapita keluarga (Rp 000 perbulan)

X_8 = Daerah asal

$X_{8.D1}$ 0 = Jambi, 1 = Jawa Tengah;

$X_{8.D2}$ 0 = Jambi; 1 = Jawa Barat

$X_{8.D3}$ 0 = Jambi, 1 = Jawa Timur;

$X_{8.D4}$ 0 = Jambi; 1 = Lainnya

X_9 = Stadia Desa (0 = Rendah; 1 = Tinggi)

$\beta_1, \beta_3, \beta_9, < 0; \beta_{8.D1}, \beta_{8.D2}, \beta_{8.D3}, \beta_{8.D4} \neq 0$

$\beta_{2.D1}, \beta_{2.D2}, \beta_{4.D1}, \beta_{4.D2}, \beta_5, \beta_{6.D1}, \beta_{6.D2}, \beta_7 > 0$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Lokasi Tujuan

Lokasi perjalanan penduduk dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi yaitu di desa sendiri, di luar desa tetapi masih merupakan desa eks transmigrasi, di luar desa yang merupakan non-transmigrasi, ke ibukota kabupaten dan ke ibukota provinsi.

Tabel 2 Persentase perjalanan penduduk menurut lokasi tujuan perjalanan pada desa-desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi, Tahun 2011

Klasifikasi Lokasi	Stadia rendah				Stadia tinggi				Rata-rata
	Mekar Sari	Bukit Mas	Sung-kai	Rata-rata	Rasau	Bandar Jaya	Rimbo Mulyo	Rata-rata	
Desa Sendiri	66.85	43.88	34.13	54.25	76.50	43.32	57.27	57.30	56.71
Desa Eks Transmigrasi Lain	0.00	53.23	0.00	14.24	7.29	51.60	40.34	36.46	30.48
Desa Non Transmigrasi	5.55	0.00	8.96	4.74	0.07	2.50	1.79	1.63	2.41
Ibukota Kabupaten	0.00	0.00	55.72	10.99	16.08	0.06	0.03	3.56	5.57
Ibukota Provinsi	27.60	2.89	1.19	15.78	0.06	2.52	0.57	1.04	4.83
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N (sampel)	38	52	19	71	38	14	83	173	244

Sumber: Penelitian Lapangan, 2011

Terlihat bahwa 56,71 perjalanan dilakukan penduduk di desa sendiri dan 43,29 % di luar desa baik untuk aktivitas belanja, penjualan produk, keuangan dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Fakta ini menunjukkan interaksi penduduk desa eks trans-migrasi relatif tinggi dengan wilayah di luar desa. Namun demikian, ternyata interaksi tersebut masih pada desa-desa eks transmigrasi lain, yaitu mencapai 30,48 % dari total perjalanan. Dengan kata lain, dari total perjalanan yang dilakukan penduduk desa eks-transmigrasi, 87,19 % dilakukan di lokasi permukiman transmigrasi (desa sendiri dan desa eks-transmigrasi lainnya), dan hanya 2,41 % dari total perjalanan dilakukan ke desa non-transmigrasi, 5,57 % ke ibukota kabupaten dan 4,83 % ke ibukota provinsi.

Desa dengan interaksi paling tinggi terhadap wilayah di luar lokasi transmigrasi adalah Desa Sungkai. Dari perjalanan ke luar desa ini, bagian terbesar dilakukan ke ibukota kabupaten, selanjutnya ke desa-desa non-transmigrasi dan ke ibukota provinsi. Besarnya proporsi perjalanan ke ibukota kabupaten disebabkan relatif dekatnya jarak desa ini ke ibukota kabupaten yaitu hanya sekitar 30 km. Selain itu relatif tingginya interaksi dengan desa-desa non transmigrasi (paling tinggi dibandingkan desa-desa lainnya) disebabkan Desa Sungkai merupakan lokasi transmigrasi yang tidak terpisah (berbatasan langsung) dengan desa-desa non transmigrasi.

Fenomena yang sama juga terlihat pada Desa Mekar Sari. Sekitar sepertiga bagian perjalanan dari penduduk dilakukan di luar desa.

Pada Desa Mekar Sari, perjalanan terbesar ke luar desa dilakukan ke ibukota provinsi. Selain itu, interaksi desa ini dengan desa non-transmigrasi juga relatif tinggi dibandingkan rata-rata desa lainnya, karena Desa Mekar Sari juga berbatasan langsung dengan desa-desa non-transmigrasi.

Selain faktor jarak ke desa-desa non-transmigrasi dan ke pusat pertumbuhan (ibukota kabupaten maupun provinsi), faktor terpenting lainnya yang menentukan interaksi ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di desa (ataupun desa eks transmigrasi lainnya yang berdekatan). Desa Rasau memiliki interaksi paling rendah dengan wilayah sekitarnya karena dibandingkan desa-desa penelitian lainnya, desa ini memiliki sarana-prasarana sosial ekonomi yang relatif lebih lengkap.

Di Desa Bandar Jaya, Bukit Mas dan Rimbo Mulyo, meskipun interaksi ke luar desa relatif tinggi, tetapi dilakukan pada desa-desa eks transmigrasi lainnya yang berdekatan. Hal ini terutama dipicu oleh keberadaan pasar di desa eks transmigrasi lainnya yang jaraknya relatif dekat. Keberadaan pasar tidak hanya membangkitkan perjalanan belanja, tetapi juga peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat sekitar.

Rustiadi dkk (2009), menyatakan dua prinsip interaksi yaitu: (1) mesin penggerak dari pergerakan dan interaksi adalah kekuatan dan dorong-tarik *supply-demand* dan (2) penghambat pergerakan dan interaksi adalah pengaruh *friction of distance*. Relatif jauhnya jarak dan tidak terbangunnya sistem transportasi pen-

ghubung desa transmigrasi dengan desa sekitarnya menjadi faktor yang menghambat terjadinya interaksi. Di sisi lain, tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa sekitar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional dengan desa transmigrasi menyebabkan tidak terbentuknya mesin penggerak dari interaksi tersebut.

Selain faktor tersebut, rendahnya interaksi desa eks transmigrasi dengan desa sekitarnya juga disebabkan lemahnya upaya pengembangan modal sosial. Menurut Woolcock (1998) dalam Rustiadi (2009) salah satu ciri penting modal sosial pada tingkat komunitas adalah keterkaitan (*linkage*) dalam suatu jaringan (*network*). Berdasarkan unsur *networking*, modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu (1) *bonding social capital* yang dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti antar anggota keluarga atau antar anggota dalam kelompok etnis tertentu, yang terbangun dengan *thick trust* karena adanya rasa percaya antar kelompok orang yang saling mengenal; (2) *bridging social capital* yang dicirikan oleh semakin banyaknya ikatan antar kelompok misalnya asosiasi bisnis, kerabat, teman dari berbagai kelompok etnis yang berbeda, yang terbangun dengan *thin trust*, rasa percaya terhadap sekelompok orang yang belum dikenal; (3) *linking social capital*, yang dicirikan oleh hubungan antara berbagai tingkat kekuatan dan status sosial yang berbeda seperti antar individu dari berbagai kelas yang berbeda.

Lemahnya pengembangan modal sosial ini khususnya dalam konteks *bridging social*

capital terlihat dari fakta di desa penelitian tidak terdapatnya forum-forum ataupun lembaga/perkumpulan/organisasi yang dikembangkan yang melibatkan secara bersama-sama masyarakat di desa transmigrasi dan masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Di desa penelitian, kelompok tani, koperasi, arisan, perkumpulan olahraga terbentuk secara terpisah antara desa transmigrasi dengan desa sekitarnya.

Selain itu, pada tahap pembinaan (sub-tahap penyesuaian), perlakuan hanya diberikan kepada transmigran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan tidak ada perlakuan yang sama kepada masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Ini menyebabkan rendahnya proses penyesuaian masyarakat di sekitar desa transmigrasi terhadap budaya baru dari pendatang dan pada tahap selanjutnya tidak berkembangnya rasa percaya antar penduduk setempat dengan transmigran pendatang.

Pemodelan Perjalanan untuk Kegiatan Bekerja

Uji multikolinearitas antar peubah bebas dari model memperlihatkan tidak terdapat masalah multikolinearitas sehingga seluruh peubah layak digunakan dalam model. Uji *Overall Model Fit* dilakukan dengan *Omnibus Test of Model Coefficients* dan uji Hosmer dan Lemeshow. Berdasarkan *Omnibus Test of Model Coefficients* didapatkan nilai statistik Chi_Square sebesar 122,697 dengan probabilitas signifikansi (p) = 0.000. Dapat disimpulkan peubah bebas dalam model secara bersama-sama mempengaruhi perilaku individu untuk

bekerja di desa atau di luar desa. Berdasarkan uji Hosmer dan Lemeshow didapatkan nilai Chi-Square sebesar 9,220 dengan $p=0,324$. Karena Chi_Square tidak signifikan ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*.

Estimasi parameter dan uji parsial diberikan pada tabel 5. Berdasarkan hasil estimasi memperlihatkan bahwa umur (X_7) berpengaruh signifikan negatif terhadap peluang bekerja antara di desa dan luar desa. Semakin tua umur, semakin menurunkan probabilitas individu bekerja di luar desa.

Tabel 3 Estimasi Parameter Model Perjalanan Bekerja

Peubah	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
X_1	-.093	.024	14.957	1	.000	.911
X_2			15.010	2	.001	
$X_{2.D1}$.223	.625	.127	1	.721	1.250
$X_{2.D2}$	1.749	.509	11.808	1	.001	5.749
X_3	.727	.470	2.395	1	.122	2.068
X_4	2.520	.513	24.105	1	.000	12.433
X_5			19.791	4	.001	
$X_{5.D1}$	2.037	.702	8.430	1	.004	7.667
$X_{5.D2}$	3.945	.925	18.175	1	.000	51.665
$X_{5.D3}$	2.774	1.007	7.583	1	.006	16.028
$X_{5.D4}$	3.024	1.051	8.271	1	.004	20.572
X_6	-.083	.445	.035	1	.852	.920
X_7	-.926	.425	4.740	1	.029	.396
Konstanta	-1.145	1.111	1.063	1	.302	.318

Tidak terdapat perbedaan peluang untuk bekerja di luar desa antara individu yang berpendidikan SLTP ($X_{2.D1}$) dengan yang berpendidikan SD ke bawah (referensi). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien dalam model yang tidak signifikan. Namun demikian, koefisien pada kelompok pendidikan SLTA ke atas ($X_{2.D2}$) signifikan positif. Ini menunjukkan individu berpendidikan SLTA ke atas memiliki peluang

yang lebih tinggi untuk bekerja di luar desa dibandingkan dengan individu berpendidikan SD ke bawah.

Status pekerjaan sampingan ($X_{3.D1}$) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini berarti bahwa peluang untuk bekerja di luar desa adalah sama antara individu yang bekerja dalam status pekerjaan sampingan dengan yang bekerja dalam status pekerjaan utama

Tabel 4 Estimasi parameter model untuk perjalanan belanja

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
$X_{1,3}$	-.449	.108	17.150	1	.000	.638
X_2			2.815	2	.245	
$X_{2,D1}$	-1.060	.686	2.387	1	.122	.346
$X_{2,D2}$	-1.006	.749	1.806	1	.179	.366
X_4			8.582	2	.014	
$X_{4,D1}$	1.779	.647	7.558	1	.006	5.926
$X_{4,D2}$	1.886	.780	5.843	1	.016	6.591
X_5	.358	.106	11.394	1	.001	1.431
X_6			5.906	2	.052	
$X_{6,D1}$	-25.438	4666.804	.000	1	.996	.000
$X_{6,D2}$	2.498	1.028	5.906	1	.015	12.153
X_7	.001	.000	4.660	1	.031	1.001
X_8			2.732	4	.604	
$X_{8,D1}$.726	.624	1.353	1	.245	2.066
$X_{8,D2}$	1.013	1.019	.990	1	.320	2.755
$X_{8,D3}$	1.449	1.177	1.515	1	.218	4.257
$X_{8,D4}$	-.494	1.475	.112	1	.737	.610
X_9	.542	.560	.940	1	.332	1.720
Konstanta	7.149	2.281	9.824	1	.002	1273.090

Pendidikan kepala keluarga ($X_{2,D1}$ dan $X_{2,D2}$) tidak berpengaruh terhadap perilaku belanja di luar desa, namun demikian pendidikan istri menunjukkan pengaruh signifikan positif. Keluarga dengan istri berpendidikan SLTP ($X_{4,D1}$) memiliki peluang belanja di luar desa sebesar 5,926 kali dan yang berpendidikan SLTA ($X_{4,D2}$) sebesar 6,591 kali dibandingkan

dengan yang berpendidikan SD ke bawah (referensi).

Umur anak (tertua) (X_5) berpengaruh positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi umur anak tertua maka semakin besar peluang keluarga tersebut berbelanja di luar desa. Sebaliknya pendidikan anak tertua (X_6) tidak berpengaruh signifikan. Ini berarti juga

tidak ada perbedaan perilaku berbelanja di luar desa pada keluarga dengan berbagai tingkatan pendidikan anak.

Pendapatan per kapita keluarga (X_7) berpengaruh signifikan positif terhadap proporsi belanja di luar desa. Semakin besar pendapatan per kapita keluarga maka akan semakin meningkatkan probabilitas keluarga tersebut untuk berada pada kategori keluarga dengan proporsi tinggi dalam hal belanja di luar desa. Dengan mengamati *odds ratio* dapat dikemukakan bahwa keluarga yang dengan pendapatan per kapita lebih tinggi (satuan Rp 1000) memiliki probabilitas 1,001 kali untuk mencapai kategori keluarga dengan proporsi tinggi dalam hal belanja di luar desa dibandingkan keluarga dengan pendapatan per kapita lebih rendah.

Berdasarkan daerah asal kepala keluarga, tidak terdapat perbedaan peluang dalam berbelanja di luar desa antara keluarga dengan kepala keluarga yang berasal dari Jawa Tengah ($X_{8,D1}$), Jawa Barat ($X_{8,D2}$), Jawa Timur ($X_{8,D3}$) dan daerah lainnya ($X_{8,D4}$) dibandingkan dengan kepala keluarga yang berasal dari Jambi (referensi). Ini ditunjukkan oleh tidak signifikannya nilai koefisien pada masing-masing peubah. Selanjutnya, estimasi parameter model memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan peluang berbelanja di luar desa antara desa stadia rendah (referensi) dengan desa stadia tinggi (X_9) Ini berarti perilaku keluarga dalam berbelanja di luar desa relatif sama antara desa-desa stadia tinggi dengan stadia rendah.

Implikasi untuk Kebijakan Pengembangan

Modal Sosial

Berdasarkan estimasi perilaku perjalanan individu baik untuk bekerja dan belanja terlihat bahwa karakteristik individu, rumah tangga dan desa memiliki pengaruh dalam interaksi individu dengan wilayah di sekitarnya. Karenanya dalam merancang kebijakan peningkatan modal sosial khususnya pada penguatan unsur *networking* perlu memperhatikan karakteristik individu, rumah tangga dan desa.

Kebijakan-kebijakan tersebut bisa dalam pembentukan forum-forum maupun lembaga/perkumpulan/organisasi yang melibatkan secara bersama-sama individu di desa transmigrasi dan desa sekitarnya. Kebijakan tersebut juga bisa dalam bentuk perancangan pola penyesuaian yang melibatkan tidak hanya transmigran untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, tetapi juga melibatkan penduduk sekitarnya untuk dapat beradaptasi dengan transmigran pendatang sehingga dapat berkembang rasa percaya antar transmigran pendatang dengan penduduk setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menemukan rendahnya interaksi desa-desa eks transmigrasi dengan desa non-transmigrasi. Hal ini disebabkan tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional (dalam bentuk *supply-demand*) dengan desa-desa transmigrasi. Di sisi lain, relatif jauhnya jarak permukiman transmigrasi dan

tidak terbangunnya sistem transportasi yang menghubungkan desa transmigrasi dengan desa sekitarnya menjadi faktor yang menghambat terjadinya interaksi.

Selain faktor tersebut, rendahnya interaksi antara juga disebabkan masih lemahnya upaya-upaya pengembangan modal sosial pada tingkat komunitas, dimana salah satu ciri pentingnya adalah keterkaitan dalam suatu jaringan

Lemahnya pengembangan modal sosial ini khususnya dalam konteks *bridging social capital* terlihat dari fakta di desa penelitian tidak terdapatnya forum-forum ataupun lembaga/perkumpulan/organisasi yang dikembangkan yang melibatkan secara bersama-sama masyarakat di desa transmigrasi dan masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Selain itu, pada tahap pembinaan, perlakuan hanya diberikan kepada transmigran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan tidak ada perlakuan yang sama kepada masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Ini menyebabkan rendahnya proses penyesuaian masyarakat terhadap budaya baru dari pendatang.

Oleh karenanya, dalam rangka pengembangan penyelenggaraan transmigrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang, khususnya yang memiliki interaksi kuat dengan wilayah sekitarnya, penelitian ini menyarankan pola pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi secara *sosial-fungsional-spasial*. Pengembangan interaksi secara sosial dilakukan

melalui pendekatan pengembangan modal sosial dalam masyarakat khususnya dalam konteks *bridging social capital*. Pengembangan interaksi fungsional dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas dan kelembagaan yang terkait secara fungsional antardesa. Pengembangan interaksi spasial dilakukan melalui pengembangan keterkaitan fisik yang kuat antardesa.

Kerangka perencanaan dan penetapan kawasan transmigrasi harus diletakkan dalam kerangka pengembangan wilayah di daerah secara utuh. Oleh karenanya pembangunan transmigrasi dalam konsep menjadi satu bagian yang tidak eksklusif dan tidak terpisah dengan pembangunan kewilayahan di daerah. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi antarinstansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anharudin, dkk, 2006 *Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca Reformasi*. Puslitbangtrans Depnakertrans. Jakarta
- Anharudin, dkk. 2008. *Transmigrasi di Era Kabinet Indonesia Bersatu*. Jakarta. Bangkit Daya Insana
- Douglass, M. 1998. *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia*. Third World Planning Review; 20(1), 1-22
- Fu, C.L.1981. *Rural-Urban Relations and Regional Development*. Huntsmen Offset Printing Pte Ltd. Singapore
- Pradhan, P.K. 2003. *Manual for Urban Rural Linkage and Rural Development Analysis*. New Hira Books Enterprises. Kirtipur. Kathmandu
- Rondinelli, D. A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis – The Spatial Dimension of Development Policy*. Westview Press, Inc. London
- Rustiadi, E dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Siswono, Y.2003. *Transmigrasi – Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Edisi Khusus Hari Bakri Transmigrasi ke-53. Jakarta